

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Kudus

Kudus merupakan sebuah kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur pantai timur laut Jawa Tengah antara Kota Surabaya Kota Semarang dan. Kota kudus berjarak 51 km dari timur Kota Semarang. Kabupaten Kudus berbatasan dengan Kabupaten Jepara di sebelah barat, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak di sebelah selatan dan Kabupaten Pati di sebelah timur. Kota Kudus terkenal sebagai kota santri dan juga sebagai kota penghasil rokok (kretek) terbesar yang ada di Jawa Tengah. Kota kudus juga dikenal sebagai pusat perkembangan agama Islam pada abad pertengahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya tiga makam wali/sunan, yaitu Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kedu.

Jumlah penduduk kota Kudus pada saat tahun 2016 tercatat sebesar 841.499 jiwa, yang terdiri dari 414.315 jiwa laki-laki (49,24%) dan 427.184 jiwa perempuan (50,76%). Dilihat dari penyebarannya, Kecamatan Jati merupakan kecamatan yang paling tinggi jumlah penduduknya yaitu sebesar 12,85% dari seluruh jumlah penduduk yang ada, kemudian Kecamatan Jekulo sebesar 12,76% dan Kecamatan Dawe sebesar 12,72 %. Dan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Bae yaitu sebesar 8,63%.

Dilihat dari perbandingannya jumlah penduduk antara perempuan dan laki-laki, yaitu diperoleh rasio jenis kelamin pada saat tahun 2016 tercatat sebesar 96,99 itu

berarti bahwa pada setiap 100 jumlah penduduk perempuan diantaranya terdapat 97 penduduk laki-laki. Hal tersebut berarti jika total penduduk perempuan yang ada lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki, ini bisa dilihat di semua kecamatan, bahwa angka rasio pada jenis kelamin di bawah 100%, yaitu berkisar antara 94,24 persen dan 98,30 persen. Kepadatan jumlah penduduk yang dihitung dalam kurun waktu 5 tahun (2012-2016) terlihat mengalami kenaikan yang diiringi dengan adanya kenaikan jumlah penduduk. Pada saat tahun 2016 tercatat sejumlah 1.979 jiwa/1 km². Di mana jumlah persebaran penduduk yang masih belum merata. Dimana Kecamatan Kota adalah kecamatan yang terpadat yaitu jumlah 9.392 jiwa per km² dan Undaan paling rendah tingkat kepadatan penduduknya yaitu hanya sebesar 1.040 jiwa per km².

Jumlah kelahiran selama tahun 2016 sebanyak 17.676 bayi, terdiri dari 5.697 bayi laki-laki dan 5.080 bayi perempuan. Pada tahun 2014 angka kelahiran kasar (CBR) menunjukkan sebesar 13,12 itu artinya dari 1000 orang penduduk terdapat kelahiran sebanyak 13 orang/bayi. Sedangkan jumlah kematian selama tahun 2014 sebanyak 5.705 jiwa dimana terdiri dari 2.807 laki-laki dan 2.898 perempuan. Dengan angka kematian kasar (CDR) nya sebesar 6,95.

Tenaga kerja yang terampil, adalah sebuah potensi dari sebuah sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan menyongsong era globalisasi. Dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Kudus data yang diperoleh menunjukkan sebesar 142.432 orang pekerja yang tersebar di 1.356 perusahaan, dimana sebagian besar adalah pekerja perempuan sebesar 69,76%. Dari data juga terlihat bahwa jumlah pencari kerja yang ada lebih banyak apabila

dibandingkan dengan besarnya lapangan usaha yang tersedia. Banyaknya pencari kerja pada tahun 2015 sebanyak 5.857 orang sesuai dengan permintaan/kebutuhan tenaga kerja yaitu sebesar 5.857 orang.

Upaya yang dilakukan untuk memperluas berbagai lapangan usaha serta kesempatan kerja antara lain dilakukan melalui program transmigrasi. Kepadatan penduduk yang belum merata memiliki dampak pada berbagai aspek yang ada. Di Kabupaten Kudus terdapat 71 keluarga yaitu sebanyak 252 jiwa yang mendaftar untuk menjadi transmigran. Transmigran terbanyak yaitu dari kecamatan Jekulo dengan jumlah 20 keluarga atau sebanyak 78 jiwa. Tetapi pada tahun 2015 tidak ada yang disalurkan untuk menjadi transmigran.

4.1.1. Industri

Sektor Industri pada kabupaten kudus merupakan tiang penyangga utama dari perekonomian yang menghasilkan kontribusi sebesar 81,06% dari PDRB yang ada pada Kabupaten Kudus. Sektor industri ini dibedakan menjadi kelompok industri besar, industri sedang, industri kecil serta industri rumah tangga. Menurut BPS, Industri Besar adalah perusahaan dengan tenaga kerja sebesar 100 orang bahkan lebih, Industri Sedang adalah perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebesar 20 s/d 99 orang, Industri Kecil adalah perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebesar 5 s/d 19 orang dan Industri Rumah tangga punya tenaga kerja kurang dari 5 orang.

Data yang didapat dari Dinas Perinkop pada saat tahun 2016 menyatakan bahwa ada sebesar 12.881 unit perusahaan industri atau unit usaha yang ada di kabupaten Kudus. Jumlah angka tersebut sudah mencakup seluruh perusahaan (unit usaha) industri yang ada di kudus, baik yang besar ataupun sedang dan industri kecil

ataupun rumah tangga. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi adanya penurunan dari jumlah unit suatu usaha industri sebesar 0,15 %. Untuk nilai produksi sendiri mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai suatu produksi pada tahun 2016 tercatat sebesar 143,09 trilyun yakni meningkat sebesar 4,00 persen. Dilihat dari segi industrinya, dalam hal ini dapat disimpulkan jika kabupaten Kudus merupakan daerah yang cukup strategis.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS tercatat bahwa perusahaan industri besar dan sedang di kabupaten Kudus pada tahun 2014 adalah sebanyak 177 perusahaan yang menyerap sebesar 98.203 orang tenaga kerja. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 jumlah perusahaan mengalami penurunan yakni sebesar 2,21%. Pada jumlah penyerapan tenaga kerja juga mengalami penurunan sebesar 0,69%.

Menurut data yang diperoleh dari PPRK, produksi rokok (SKT, SKM & Klobot) pada Kabupaten Kudus menyatakan jika tahun ini mengalami penurunan sebesar 0,54 persen di bandingkan tahun sebelumnya. Menurut data kantor BPMPT, besarnya nilai investasi Mandiri di Kabupaten Kudus sebesar 18,61 trilyun, PMA dan PMDN untuk tahun 2016 tidak ada.

4.1.2. Potensi Daerah

1. Perdagangan

Potensi ekonomi pada suatu daerah khususnya pada sektor perdagangan dapat diketahui dari banyaknya jumlah pasar yang ada. Pasar sendiri merupakan media bertemunya antara penjual dan pembeli, sehingga semakin ramai transaksi terjadi berarti semakin tinggi pula potensi sektor perdagangan.

Data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus, pada tahun 2016, terdapat 56 pasar modern, 5 buah pasar daerah, 25 buah pasar desa dan 2 buah pasar hewan. Dimana jumlahnya adalah 88 pasar. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang lumayan besar jika di bandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada, atau rata-rata per kecamatan ada sekitar 9 sampai 10 buah pasar. Banyaknya penyaluran Gas LPG 3 Kg selama tahun 2016 yang lalu yaitu 6,79 juta tabung. Pita cukai rokok yang dihasilkan oleh Kabupaten Kudus selama tahun 2016 yang lalu tercatat sebesar 29,96 trilyun rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada kenaikan sebesar 14,08 persen. Nilai tersebut dihasilkan dari SKM (Sigaret Kretek Mesin) sebanyak 26,10 trilyun atau 87,11 persen, SKT (Sigaret Kretek Tangan) sebesar 3,86 trilyun atau 12,89 persen dan rokok klobot 146,22 juta rupiah atau 0,0005 persen.

2. Ekspor

Sedangkan untuk potensi ekspor berbagai jenis komoditi non migas secara umum nilainya mengalami kenaikan. Tahun 2014 total nilai ekspor tercatat sebesar 89,94 juta US \$ sedangkan di tahun 2016 naik menjadi 95,20 juta US \$ dengan volume 9.345 ton/pcs. Tiga komoditas ekspor dengan kontribusi yang besar berturut-turut adalah rokok kretek (52,28 persen), elektronik (10,81 persen), dan kertas sebesar (28,03 persen).

3. Hotel dan Pariwisata

Jumlah hotel yang ada pada tahun 2016 ini tetap dibanding tahun sebelumnya yaitu 27 buah yang terkonsentrasi di lima Kecamatan yaitu : Kaliwungu, Kota, Jati, Bae dan Dawe terdiri dari 7 hotel berbintang dan 20 hotel non bintang. Kamar yang

tersedia sebanyak 870 buah kamar dimana 65 diantaranya berkelas Suite sedangkan jumlah tempat tidur sebanyak 1.314 buah dan banyaknya karyawan adalah 410 orang.

Untuk TPK (Tingkat Penghunian Kamar) baik pada bintang maupun non bintang pada tahun 2016 tercatat rata-rata sebesar 49,59 persen per bulannya, dimana TPK tertinggi terjadi di bulan Januari yakni 63,01 persen dan terendah sebesar 38,66 persen tercatat pada bulan Juni. Untuk RLM (Rata-Rata Lama Menginap tamu hotel) tercatat untuk seluruh hotel rata-rata sebesar 1,86 malam per bulannya, yang artinya rata-rata seorang tamu yang datang akan menginap selama 1,86 malam.

Obyek wisata di bawah Dinas Pariwisata kabupaten Kudus tercatat sebanyak 6 tempat wisata, yaitu Menara Kudus, Colo, Tugu Identitas, Krida Wisata, Museum Kretek dan Situs Pati Ayam.

4.2. Visi Dan Misi

Visi

“Terwujudnya Kudus Yang Semakin Sejahtera”

Misi

- Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,
- Mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau dan berkualitas,
- Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau,
- Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh,

- Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing,
- Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governnance),
- Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial.

4.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, untuk melaksanakan urusan–urusan, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas–tugas lainnya, Pemerintah Kabupaten Kudus yang dipimpin oleh seorang Bupati dengan dibantu oleh seorang Wakil Bupati dan perangkat daerah, meliputi :

A. Sekretariat Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) Asisten Sekda, 10 (sepuluh) Bagian sebagai unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi Bupati Kudus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus.

1. Asisten Pemerintahan
 - a. Bagian Tata Pemerintahan
 - b. Bagian Pemerintahan Desa
 - c. Bagian Hukum
 - d. Bagian Humas
2. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra
 - a. Bagian Perekonomian
 - b. Bagian Kesra

- c. Bagian Pengendalian Pembangunan
- 3. Asisten Administrasi dan Keuangan
 - a. Bagian Umum
 - b. Bagian Pengelolaan Aset Daerah
 - c. Bagian Organisasi dan Kepegawaian
- B. Sekretariat DPRD yang terdiri dari 4 (empat) Bagian sebagai unsur staf yang mendampingi DPRD dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi Bupati Kudus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus.
- C. Dinas Daerah yang terdiri dari 12 (dua belas) Dinas, sebagai unsur pelaksana urusan daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus.

Adapun rincian dinas daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 4) Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral
- 5) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
- 6) Dinas Pertanian, Perikanan dan Perindustrian
- 7) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 8) Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM
- 9) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- 10) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 11) Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar
- 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

D. Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah yang berjumlah 9 (sembilan) lemtekda adalah sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang berdifat spesifik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus.

Selain Bappeda dan Inspektorat, 9 (sembilan) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Badan Kepegawaian Daerah,
- 2) Badan Pemberdayaan Perempuan,
- 3) Masyarakat dan Keluarga Berencana,
- 4) Kantor Ketahanan Pangan,
- 5) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik,
- 6) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah,
- 7) Kantor Lingkungan Hidup,
- 8) Rumah Sakit Umum Daerah,
- 9) Satuan Polisi Pamong Praja,
- 10) Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu

E. Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dan 9 (sembilan) Kelurahan. Sebagai unsur kewilayahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Secara lengkap kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Kaliwungu,
- 2) Kecamatan Kota,
- 3) Kecamatan Jati,
- 4) Kecamatan Undaan,
- 5) Kecamatan Mejobo,
- 6) Kecamatan Jekulo,
- 7) Kecamatan Bae,
- 8) Kecamatan Gebog dan
- 9) Kecamatan Dawe
- 10) Kelurahan Purwosari,
- 11) Kelurahan Sunggingan,
- 12) Kelurahan Panjunan,
- 13) Kelurahan Wergu Wetan,
- 14) Kelurahan Wergu Kulon,
- 15) Kelurahan Mlati Kidul,
- 16) Kelurahan Mlati Norowito,
- 17) Kelurahan Kerjasan dan
- 18) Kelurahan Kajeksan

4.4. Deskriptif Variabel

Berikut ini merupakan data keuangan pemerintah kabupaten Kudus tahun 2013-2017.

Tabel 4.1
Anggaran/Target APBD

URAIAN	Anggaran/target				
	2013	2014	2015	2016	2017
PENDAPATAN DAERAH	1.346.817.650.000	1.585.733.326.000	1.782.332.513.000	2.027.013.360.000	2.005.527.819.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH	138.912.024.000	206.560.187.000	255.275.392.000	287.096.753.000	373.804.376.000
Pajak daerah	50.392.794.000	60.466.000.000	71.511.000.000	77.322.717.000	92.468.615.000
Hasil retribusi daerah	20.609.924.000	22.092.880.000	19.137.814.000	18.161.100.000	20.197.247.000
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.505.015.000	5.077.400.000	8.051.588.000	6.437.701.000	17.677.057.000
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	63.404.291.000	118.943.907.000	156.574.990.000	185.175.235.000	243.461.457.000
DANA PERIMBANGAN	930.992.277.000	1.026.921.246.000	1.057.634.172.000	1.383.453.888.000	1.336.533.094.000
Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	159.376.462.000	175.880.495.000	196.167.265.000	218.707.990.000	255.099.012.000
Dana alokasi umum	719.406.935.000	795.851.851.000	784.919.177.000	822.153.771.000	807.711.173.000
Dana alokasi khusus	52.208.880.000	55.188.900.000	76.547.730.000	342.592.127.000	273.722.909.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	276.913.349.000	352.251.893.000	469.422.949.000	356.462.719.000	295.190.349.000
Pendapatan Hibah	6.571.270.000	6.426.400.000	19.927.090.000	12.851.453.000	8.100.000.000
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	59.225.259.000	78.870.404.000	123.345.920.000	154.613.719.000	123.074.008.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	146.439.054.000	171.705.007.000	264.680.001.000	86.222.147.000	111.187.281.000
Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	64.677.776.000	95.250.082.000	61.469.938.000	102.775.400.000	52.829.060.000
BELANJA DAERAH	1.307.667.758.000	1.815.266.664.000	2.128.385.154.938.000	2.454.116.449.000	2.168.208.115.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG	806.181.215.000	919.239.597.000	1.020.128.917.000	1.181.191.512.000	1.110.315.920.000
Belanja Pegawai	700.288.330.000	777.938.012.000	817.761.217.000	920.491.974.000	806.988.086.000
Belanja Bunga	70.802.000	70.802.000	70.802.000	3.398.000	
Belanja Hibah	35.316.645.000	50.055.515.000	26.734.745.000	31.156.428.000	58.404.510.000
Belanja Bantuan Sosial	24.938.887.000	36.070.987.000	27.302.507.000	27.498.005.000	7.786.280.000
Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	4.418.196.000	6.280.726.000	9.213.406.000	9.467.435.000	11.266.588.000

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kab/kota dan pemerintah desa dan partai politik	39.148.355.000	45.027.635.000	136.046.240.000	190.574.272.000	224.834.456.000
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	3.795.920.000	3.000.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000
BELANJA LANGSUNG	501.486.543.000	896.027.067.000	1.108.256.237.000	1.272.924.937.000	1.057.892.195.000
Belanja Pegawai	31.525.217.000	33.146.981.000	55.456.909.000	40.259.296.000	49.279.465.000
Belanja Barang dan Jasa	312.777.569.000	486.453.132.000	461.440.488.000	458.548.550.000	466.595.435.000
Belanja Modal	157.183.757.000	376.426.954.000	591.358.840.000	774.117.091.000	542.017.295.000
Surplus/Defisit	39.149.892.000	(229.533.338.000)	(346.052.641.000)	(427.103.089.000)	(162.680.296.000)

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus

Anggaran pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp. 1.346.817.650.000 yang terdiri dari komponen pendapatan asli daerah sebesar Rp. 138.912.024.000 dana perimbangan Rp. 930.992.2777.000 dan lain-lain pendapatan yang sah Rp. 276.913.349.000. Anggaran untuk belanja sebesar Rp.1.307.667.758.000 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.806.181.215.000 dan belanja langsung sebesar Rp.501.486.543.000.

Sedangkan anggaran pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp. 1.585.733.326.000 yang terdiri dari komponen pendapatan asli daerah sebesar Rp. 206.560.187.000 dana perimbangan Rp. 1.026.921.246.000 dan lain-lain pendapatan yang sah Rp.352.251.893.000. Dan total anggaran belanja pada tahun 2014 sebesar Rp.1.815.266.665.000 yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 919.239.597.000 dan belanja langsung sebesar Rp. 896.027.067.000.

Anggaran pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp.1.782.332.513.000 yang terdiri dari pendapatan asli

daerah sebesar Rp. 255.275.392.000, dana perimbangan Rp. 1.057.634.172.000 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 469.422.949.000 dengan anggaran belanja sebesar Rp.2.128.385.154.000 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.1.020.128.917.000 dan belanja langsung sebesar Rp.1.108.256.237.000.

Anggaran pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp. 2.027.013.360.000 yang terdiri dari pendapatan asli daerah Rp. 287.096.753.000, dana perimbangan Rp. 1.383.453.888.000, lain-lain pendapatan yang sah Rp. 356.462.719.000 dengan anggaran belanja sebesar Rp.454.116.449.000 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.181.191.512.000 dan belanja langsung sebesar Rp. 1.272.924.937.000.

Dan untuk anggaran pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 2.005.527.819.000 yang terdiri dari pendapatan asli daerah Rp.373.804.376.000, dana perimbangan Rp.1.336533.094.000 dan lain-lain yang sah sebesar Rp 295.190.349.000 dengan anggaran belanja sebesar Rp. 2.168.208.115.000 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.110.315.920.000 dan belanja langsung sebesar Rp. 1.057.892.195.000.

Dari tabel diatas bisa diketahui bahwa dalam total pendapatan pemerintah kabupaten Kudus mengalami peningkatan dari tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017. Hal ini dipicu oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 4.2
Realisasi APBD

URAIAN	Realisasi				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pendapatan Daerah	1.386.183.084.659	1.610.237.157.941	1.759.781.233.001	1.880.999.970.784	1.983.213.078.247
Pendapatan asli daerah	144.995.092.035	234.073.380.352	259.295.905.248	279.239.106.717	366.031.203.778
Pajak daerah	58.194.212.419	63.085.731.660	78.860.989.366	84.453.872.873	103.927.599.502
Hasil retribusi daerah	15.588.523.244	21.083.379.548	18.093.279.315	16.799.373.970	19.849.728.536
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.318.220.147	5.077.402.066	8.051.589.485	6.437.703.100	17.677.058.831
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	66.894.136.225	144.826.867.078	154.290.047.082	171.548.156.774	224.576.816.909
Dana Perimbangan	954.512.784.776	1.012.351.534.176	1.033.505.128.258	1.290.967.072.066	1.310.924.033.469
Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	182.896.969.776	175.108.008.176	187.347.767.258	240.510.038.401	246.044.588.085
Dana alokasi umum	719.406.935.000	795.851.851.000	784.919.177.000	822.153.771.000	807.711.173.000
Dana alokasi khusus	52.208.880.000	41.391.675.000	61.238.184.000	228.303.262.665	257.168.272.384
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	286.675.207.848	363.812.243.413	466.980.199.495	310.793.792.001	306.257.841.000
Pendapatan Hibah	1.076.193.701	6.248.092.916	16.282.282.537	10.322.044.000	8.388.252.000
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	74.958.695.147	95.320.988.497	112.356.677.958	113.828.873.801	134.625.008.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	146.439.054.000	169.337.757.000	264.680.001.000	87.184.574.200	111.187.281.000
Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	64.201.265.000	92.905.405.000	73.661.238.000	99.458.300.000	52.057.300.000
Belanja Daerah	1.155.490.615.349	1.508.269.213.968	1.710.860.243.449	2.126.942.733.903	2.006.998.142.946
Belanja Tidak Langsung	738.734.501.503	848.624.442.304	929.054.238.904	1.039.564.876.540	1.059.277.096.963
Belanja Pegawai	647.389.397.621	716.652.790.837	752.900.556.127	795.248.819.214	767.403.149.313
Belanja Bunga	44.378.263	30.359.278	16.878.577	3.397.876	
Belanja Hibah	25.607.571.733	48.794.986.000	11.465.425.000	20.654.425.000	50.701.785.000
Belanja Bantuan	24.098.658.500	32.133.595.000	20.244.810.000	24.507.720.000	7.579.640.000

Sosial					
Belanja bagi hasil pd provinsi/kab/kota dan pemerintah desa	4.319.038.625	6.280.724.375	9.183.182.300	9.467.435.000	11.195.355.700
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/kab/kota dan pemerintah desa dan partai politik	37.271.465.261	43.212.266.814	134.792.186.900	189.683.079.450	222.397.166.950
Belanja Tidak Terduga	3.991.500	1.519.720.000	451.200.000	0	0
Belanja Langsung	416.756.113.846	659.644.771.664	781.806.004.545	1.087.377.857.363	947.721.045.983
Belanja Pegawai	26.370.693.217	27.071.083.964	34.273.533.385	32.634.901.847	42.710.464.090
Belanja Barang dan Jasa	257.412.961.477	375.722.866.995	296.202.161.981	376.537.189.252	404.229.809.466
Belanja Modal	132.972.459.152	256.850.820.705	451.330.309.179	678.205.766.264	500.780.772.427
Surplus/Defisit	230.692.469.310	101.967.943.973	48.920.989.552	(245.942.763.119)	(23.785.064.699)

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan Kabupaten Kudus pada tahun 2013 adalah sebesar Rp.1.386.183.084.659 yang terdiri dari komponen PAD , dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Penerimaan tersebut digunakan untuk kebutuhan belanja daerah sebesar Rp.1.155.490.615.349 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.738.734.501.503 dan belanja langsung sebesar Rp.416.756113.846.

Pada tahun 2014 realisasi pendapatan Kabupaten Kudus adalah sebesar Rp.1.610.237.157.941 yang terdiri dari komponen PAD, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Penerimaan tersebut digunakan untuk kebutuhan belanja daerah sebesar Rp.1.508.269.213.968 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.848.624.442.304 dan belanja langsung sebesar Rp.659.644.771.664.

Pada tahun 2015 realisasi pendapatan Kabupaten Kudus adalah sebesar Rp.1.759.781.233.001 yang terdiri dari komponen PAD, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Penerimaan tersebut digunakan untuk kebutuhan belanja daerah sebesar Rp.1.710.860.243.449 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.929.054.238.904 dan belanja langsung sebesar Rp.781.806.004.545.

Pada tahun 2016 realisasi pendapatan Kabupaten Kudus adalah sebesar Rp.1.880.999.970.784 yang terdiri dari komponen PAD, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Penerimaan tersebut digunakan untuk kebutuhan belanja daerah sebesar Rp.2.126.942.733.903 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.1.039.564.876.540 dan belanja langsung sebesar Rp.1.087.377.857.363.

Pada tahun 2017 realisasi pendapatan Kabupaten Kudus adalah sebesar Rp.1.983.213.078.247 yang terdiri dari komponen PAD, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Penerimaan tersebut digunakan untuk kebutuhan belanja daerah sebesar Rp.2.006.998.142.946 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.1.059.277.096.963 dan belanja langsung sebesar Rp.947.721.045.983.

4.5. Analisis Data

Mengacu pada anggaran/target dan realisasi APBD diatas *Value for money* dapat diukur dengan menggunakan rumus ekonomis, efisiensi dan efektifitas untuk dapat mengetahui suatu Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai berikut :

1. Rasio Ekonomi

Rasio ekonomi menggambarkan suatu kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran pengeluaran yang dibandingkan dengan realisasi anggaran. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikatakan ekonomis apabila rasio yang dicapai mencapai 100%. Berikut ini tabel yang menggambarkan rasio ekonomis pemerintah kabupaten Kudus :

Tabel 4.2
Rasio Ekonomi

No	Tahun	Anggaran/target pengeluaran	Realisasi pengeluaran	Rasio Ekonomis	keterangan
1	2013	1.307.667.758.000	1.155.490.615.349	113,17%	Sangat ekonomis
2	2014	1.815.266.664.000	1.508.269.213.968	120,35%	Sangat ekonomis
3	2015	2.128.385.154.000	1.710.860.243.449	124,40%	Sangat ekonomis
4	2016	2.454.116.449.000	2.126.942.733.903	115,38%	Sangat ekonomis
5	2017	2.168.208.115.000	2.006.998.142.846	108,03%	Sangat ekonomis

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus

Dari tabel diatas menggambarkan analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus berdasarkan konsep *value for money* rasio ekonomis.

Hasil uji *value for money* menunjukkan bahwa :

- a. Pada tahun anggaran 2013 rasio ekonomi mencapai 113,17% jumlah tersebut berada pada rentang diatas 100% dimana pemerintah kabupaten Kudus dikatakan sangat ekonomis karena realisasi pengeluaran tidak melebihi dari anggaran yang telah direncanakan.

- b. Pada tahun anggaran 2014 rasio ekonomi mencapai 120,35% jumlah tersebut berada pada rentang diatas 100% dan terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,18% dimana pemerintah kabupaten Kudus dikatakan sangat ekonomis karena karena dapat merealisasikan pengeluaran tidak lebih dari anggaran yang direncanakan.
- c. Pada tahun anggaran 2015 rasio ekonomi mencapai 124,40% dan pemerintah kabupaten Kudus masih dikatakan sangat ekonomis hal ini dipicu karena anggaran/target pengeluaran dari tahun ke tahun terus meningkat.
- d. Pada tahun anggaran 2016 rasio ekonomi mencapai 115,38% cenderung menurun dari tahun 2015 hal tersebut dipicu karena pengeluaran daerah meningkat signifikan dari tahun 2013-2016.
- e. Pada tahun anggaran 2017 rasio ekonomi mencapai 108,03% jumlah tersebut berada pada rentang lebih dari 100% dan masih dikatakan sangat ekonomis karena perbandingan antara cukup seimbang yaitu anggaran/target pengeluaran sebesar Rp.2.168.208.115.000 dan realisasi pengeluaran sebesar Rp.2.006.998.142.846.

2. Rasio Efisien

Rasio efisiensi dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi pengeluaran dan realisasi pendapatan. Semakin kecil tingkat rasio efisiensi berarti semakin baik kinerja pemerintah daerah, sebaliknya semakin tinggi rasio efisiensi berarti semakin rendah kinerja pemerintah daerah. Berikut ini tabel yang menggambarkan rasio efisiensi pemerintah Kabupaten Kudus 2013-2017 :

Tabel 4.3
Rasio Efisiensi

No	Tahun	Realisasi pengeluaran	Realisasi pendapatan	Rasio Efisiensi	Keterangan
1	2013	1.155.490.615.349	1.386.183.084.659	83,36%	cukup efisien
2	2014	1.508.269.213.968	1.610.237.157.941	93,67%	kurang efisien
3	2015	1.710.860.243.449	1.759.781.233.001	97,22%	kurang efisien
4	2016	2.126.942.733.903	1.880.999.970.784	113,08%	tidak efisien
5	2017	2.006.998.142.846	1.983.213.078.247	101,20%	tidak efisien

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus

Dari tabel diatas menggambarkan analisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus berdasarkan rasio efisiensi, hasil uji *value for money* menunjukkan bahwa, untuk pengukuran rasio efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Kudus pada tahun 2013 dikatakan cukup efisien atau sebesar 83,36%. Rasio efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2014 dan 2015 adalah sebesar 93,67% dan 97,22% atau dapat dikatakan kurang efisien. Rasio efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2016 dan 2017 adalah sebesar 113,08% dan 101,20% atau dikatakan tidak efisien karena pada tahun tersebut realisasi pengeluaran (output) tidak dapat mencapai anggaran yang ditetapkan.

3. Rasio Efektivitas

Rasio efektifitas merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang telah ditetapkan. Kemampuan suatu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dapat dikatakan efektif jika rasio yang dicapai dapat mencapai minimal sebesar satu atau 100%. Berikut ini tabel yang menggambarkan rasio efektifitas pemerintah Kabupaten Kudus :

Tabel 4.4
Rasio Efektivitas

No	Tahun	Realisasi pendapatan	Anggaran pendapatan	Rasio Efektifitas	Keterangan
1	2013	1.386.183.084.659	1.346.817.650.000	102,92%	Sangat Efektif
2	2014	1.610.237.157.941	1.585.733.326.000	101,55%	Sangat Efektif
3	2015	1.759.781.233.001	1.782.332.513.000	98,73%	Efektif
4	2016	1.880.999.970.784	2.027.013.360.000	92,80%	Efektif
5	2017	1.983.213.078.247	2.005.527.819.000	98,89%	Efektif

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus

Dari tabel diatas menggambarkan analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten kudus berdasarkan rasio efektifitas. Hasil uji *value for money* menunjukkan bahwa rasio efektifitas pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Kudus pada tahun 2013 dan 2014 adalah sebesar 102,92% dan 101,55% dikatakan sangat efektif karena rasio efektifitas berada diatas 100%. Meskipun presentase pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1,37%. Rasio efektifitas pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Kudus pada tahun

2015 dan 2016 adalah sebesar 98,73% dan 92,80% atau dikatakan efektif meskipun presentase mengalami penurunan sebesar 5,93% dari tahun sebelumnya. Rasio efektifitas pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Kudus pada tahun 2017 adalah sebesar 98,89% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 6,09% dan berada pada kriteria efektif.

4.6. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, rata-rata kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus berdasarkan analisis rasio sebagai berikut :

Tabel 4.5
Rata-rata rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata	Keterangan
Ekonomis	113,17%	120,35%	124,40%	115,38%	108,03%	116,26%	Sangat ekonomis
Efisiensi	83,36%	93,67%	97,22%	113,08%	101,20%	97,71%	Kurang efisien
Efektifitas	102,92%	101,55%	98,73%	92,80%	98,89%	98,97%	Efektif

Sumber: Data mentah diolah, 2018

4.6.1. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus diukur dengan menggunakan elemen ekonomis

Pengukuran ekonomis terkait dengan membandingkan antara target pengeluaran dengan realisasi pengeluaran. Berdasarkan perhitungan ekonomis Pemerintah Kabupaten Kudus menunjukkan kriteria sangat ekonomis selama tahun 2013-2017. Dengan rata-rata rasio ekonomis sebesar 116,26%.

Jika kita analisis satu persatu, pada tahun 2013 target pengeluaran menunjukkan sebesar Rp.1.307.667.758.000 diikuti realisasi yang hampir melalui target yaitu sebesar Rp.1.155.490.615.349 dengan selisih sebesar Rp.152.177.142.651 hal tersebut membuktikan bahwa tingkat ekonomis pemerintah kabupaten Kudus berada pada kategori sangat ekonomis dalam pelaksanaan anggaran pengeluaran yakni sebesar 113,17%.

Pada tahun 2014 target tersebut naik menjadi sebesar Rp.1.815.266.664.000 diikuti dengan realisasi sebesar Rp. 1.508.269.213.968, presentase pada tahun 2014 juga mengalami peningkatan yakni sebesar 120,35% dengan kriteria sangat ekonomis dengan selisih yang terealisasi sebesar Rp.306.997.450.032 yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Tahun 2015 anggaran tersebut naik menjadi sebesar Rp. 2.128.385.154.000 diikuti dengan realisasi sebesar Rp. 1.710.860.243.449 dan selisih sebesar Rp.417.524.910.551. Presentase pada tahun 2015 juga mengalami peningkatan yakni sebesar 124,40%. Walaupun presentasi ekonomis mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, tingkat ekonomis tetap berada pada kriteria sangat ekonomis.

Pada tahun 2016 tingkat ekonomis mengalami penurunan dengan presentase ekonomis sebesar 115,38% yang diikuti dengan kenaikan target sebesar Rp.2.454.116.449.000 dan realisasi sebesar Rp.2.126.942.733.903 dan tingkat ekonomisnya pun mengalami penurunan karena sisa anggaran yang terealisasi dari target mencapai Rp.327.173.715.097 tetapi masih dalam kriteria sangat ekonomis.

Pada tahun 2017 target menurun dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp.2.454.116.449.000 menjadi Rp.2.168.208.115.000 dengan realisasi sebesar Rp.2.006.998.142.846 dengan selisih 161.209.972.154. Meskipun tingkat ekonomis mengalami penurunan tetapi masih berada dalam kriteria sangat ekonomis.

Pada tahun 2013 target belanja menunjukkan sebesar Rp.1.307.667.758.000 yang terealisasi sebesar Rp1.155.490.615.349 atau 88,336% dengan rincian belanja operasi sebesar Rp1.144.065.805.000 yang terealisasi sebesar Rp1.018.195.126.072 atau 89,00% dengan penggunaan sebagai berikut:

- Pada belanja Pegawai yang ditargetkan sebesar Rp.731.813.547.000 terealisasi sebesar Rp.673.670.090.838 atau 92,07% yang tidak terealisasi sebesar Rp.58.139.053.662 tersebut diantaranya sebesar Rp.15.851.315.872 untuk tunjangan profesi guru yang akan dibayarkan pada tahun 2014.
- Belanja Barang sebesar Rp.204.178.257.000 terealisasi sebesar Rp169.587.919.252 atau 83,06%, realisasi ini sesuai dengan kebutuhan riil.
- Anggaran Belanja Bunga sebesar Rp.70.802.000 berupa bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp44.378.263 atau 62,68% sedangkan tahun 2012 terealisasi sebesar Rp1.054.653.530.
- Belanja Hibah sebesar Rp.143.915.957.000 terealisasi sebesar Rp.113.432.613.958 atau 78,82% yang peruntukannya digunakan untuk belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp.18.221.000.000 terealisasi Rp.9.152.476.733 atau 50,23%.

Dan pada belanja modal menunjukkan pengeluaran sebesar Rp157.183.757.000 yang terealisasi sebesar Rp.132.972.459.152 atau 84,60%. Belanja tak terduga sebesar Rp2.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp3.991.500 atau 0,20%. Dan untuk transfer bagi hasil ke Kab/Kota/Desa sebesar Rp4.418.196.000 terealisasi sebesar Rp4.319.038.625 atau 97,76%. Selanjutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus mengalami Surplus Anggaran sebesar Rp230.692.469.310. Sedangkan pada tahun 2012 mengalami defisit sebesar Rp4.971.941.236.

Target belanja pada tahun 2014 adalah sebesar Rp1.815.266.664.000 dan terealisasi sebesar Rp1.508.269.213.968 yang digunakan untuk belanja operasi sebesar Rp1.428.763.064.000 terealisasi sebesar Rp1.243.617.948.888 atau 87,04%, belanja modal sebesar Rp376.426.954.000 terealisasi sebesar Rp256.850.820.705 atau 68,23% yang dipergunakan seluruhnya untuk mendukung terwujudnya keberlangsungan pembangunan utamanya dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, belanja tak terduga sebesar Rp3.795.920.000 terealisasi sebesar Rp1.519.720.000 atau 40,04% yang dipergunakan untuk pengembalian dana mantan anggota DPRD Kabupaten Kudus periode 1999-2004 yang dititipkan ke kas daerah tahap I kepada Wiyono, SH. Cs dan transfer bagi hasil ke Kab/Kota/Desa sebesar Rp6.280.726.000 yang terealisasi sebesar Rp6.280.724.375 atau 100%. Selanjutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus mengalami Surplus Anggaran sebesar Rp101.967.943.973. Sedangkan pada tahun 2013 mengalami defisit sebesar Rp229.533.338.000.

Pengeluaran pada tahun 2015 menunjukkan angka sebesar Rp1.983.125.508.000 yang terealisasi sebesar Rp1.562.873.061.548 atau 78,81%, yang digunakan untuk belanja operasi sebesar Rp1.388.766.668.000 terealisasi sebesar Rp1.111.091.552.369, atau 80,01%, belanja modal anggaran sebesar Rp591.358.840.000 terealisasi sebesar Rp451.330.309.179 atau 76,32% yang dipergunakan seluruhnya untuk mendukung terwujudnya keberlangsungan pembangunan utamanya dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat, belanja tak terduga sebesar Rp3.000.000.000 terealisasi sebesar Rp451.200.000 atau 15,04% yang dipergunakan untuk pengembalian dana mantan anggota DPRD Kabupaten Kudus periode 1999-2004 yang dititipkan ke kas daerah tahap II kepada Drs. Asrofi Masyitho dkk. Dan untuk transfer dengan anggaran sebesar Rp145.259.646.000 terealisasi sebesar Rp143.975.369.200 terdiri dari transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp9.213.406.000 yang terealisasi Rp9.183.182.300,00 atau 99,67% dan transfer bantuan keuangan Rp136.046.240.000 terealisasi Rp134.792.186.900 atau 99,08%. Selanjutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus mengalami Surplus Anggaran sebesar Rp48.920.989.552,86. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami surplus sebesar Rp101.967.943.973.

Pada belanja tahun 2016 yang ditetapkan sebesar Rp2.254.074.742.000 terealisasi sebesar Rp1.927.792.219.453 atau 85,52% dengan rincian belanja operasi yang ditetapkan sebesar Rp1.477.957.651.000 dan terealisasi sebesar Rp1.249.586.453.189 atau 84,55%. Belanja modal yang dialokasikan sebesar Rp774.117.091.000 dan terealisasi sebesar Rp678.205.766.264 atau 87,61%,

belanja tak terduga sebesar Rp2.000.000.000 pada tahun 2016 yang tidak digunakan serta besaran transfer yang dialokasikan sebesar Rp200.041.707.000 dan terealisasi sebesar Rp199.150.514.450 atau 99,55%.

Dan pada belanja tahun 2017 yang ditetapkan sebesar Rp1.932.107.071.000 dan terealisasi sebesar Rp2.006.998.142.946 atau 92,56% dengan rincian belanja operasi yang ditetapkan sebesar Rp1.389.089.776.000 diikuti realisasi sebesar Rp1.272.624.847.869 atau 91,62%, belanja modal yang dialokasikan sebesar Rp542.017.295.000 dan terealisasi sebesar Rp500.780.772.427 atau 92,39%, belanja tak terduga sebesar Rp1.000.000.000 pada tahun 2017 yang tidak digunakan dan transfer yang dialokasikan sebesar Rp236.101.044.000 dan terealisasi sebesar Rp233.592.522.650 atau 98,94%.

Tingkat pengukuran kinerja keuangan pemerintah kabupaten Kudus secara ekonomis dari tahun ke tahun selalu berada pada kategori sangat ekonomis, hal tersebut disebabkan karena adanya realisasi pengeluaran yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Dilihat dari kriteria rasio ekonomis, dapat diasumsikan bahwa kegiatan yang diprogramkan sudah terealisasi dan sesuai yang diharapkan sesuai dengan lampiran Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus periode 2013 sampai tahun 2017.

4.6.2. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus diukur dengan menggunakan elemen Efisiensi

Berbeda halnya dengan presentase rasio ekonomis, kriteria rasio efisiensi justru berbanding terbalik karena jika hasil pencapaian semakin rendah presentase rasionya maka akan semakin efisien kinerja tersebut. Berdasarkan Perhitungan

efisiensi kinerja yang dipengaruhi oleh laporan realisasi APBD pada Pemerintah Kabupaten Kudus menunjukkan kriteria yang bervariasi selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Dan rata-rata efisiensinya yaitu 97,71%, hal ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja dalam kurun waktu tersebut adalah kurang efisien.

Rasio efisiensi pada tahun 2013 berada pada kategori cukup efisien yaitu sebesar 83,36%, tetapi pada tahun 2014-2015 rasio efisiensi menurun sebesar 10,31% dan 3,55% yaitu sebesar 93,67% dan 97,22% berada pada kategori kurang efisien, dan pada tahun 2016-2017 dikatakan tidak efisien karena rasio efisiensi melebihi 100% yaitu sebesar 113,08% dan 101,20%. Berdasarkan rata-rata pengukuran rasio efisiensi pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 pemerintah Kabupaten Kudus dikatakan kurang efisien.

Dalam menghitung tingkat efisiensi, dilakukan dengan menghitung tingkat anggaran belanja dengan membandingkan realisasi pengeluaran dengan realisasi pendapatan, dimana tingkat realisasi pengeluaran yang di maksud merupakan total realisasi belanja dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, maka peneliti harus berpatokan pada hal biaya. Dimana efisiensi ditentukan oleh ketetapan dalam mendayagunakan anggaran belanja dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input yang mengacu pada pencapaian tujuan yang semaksimal mungkin. Adapun faktor yang bisa membantu menggunakan anggaran belanja pemerintah dengan efisien yaitu dengan melakukan belanja tidak melebihi dari anggaran yang ditetapkan.

Sesuai dengan pengertian efisien yakni penggunaan dana yang seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sudah berhasil memenuhi tingkat efisiensi pelaksanaan realisasi pengeluaran melalui beberapa program yang sudah dijalankan. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus telah berhasil menggunakan dana yang kecil untuk menjalankan beberapa program yang sudah direncanakan meskipun belum bisa mencapai hasil yang maksimal.

4.6.3. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus diukur dengan menggunakan elemen Efektivitas

Kinerja keuangan pemerintah dikatakan efektif apabila realisasi pendapatan mencapai target pendapatan dan sasaran yang telah ditentukan. Pengukuran efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya yang dicapai. Berdasarkan rata-rata pengukuran rasio efektifitas pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 pemerintah Kabupaten Kudus berada pada kategori efektif karena rasio kurang dari 100% yaitu hanya sebesar 98,97%.

Pada tahun 2013 kinerja keuangan pemerintah masuk dalam kriteria sangat efektif, dikarenakan anggaran yang ditentukan sudah banyak terserap dan hanya beberapa yang belum terserap. Dapat dilihat pada lampiran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2013, target PAD sebesar Rp.138.912.024.000 terealisasi sebesar Rp144.995.092.035 atau 104,38%. Secara keseluruhan PAD tercapai melebihi target yang ditentukan, namun khusus pada obyek PAD tentang retribusi daerah dari target sebesar Rp20.609.924.000 hanya terealisasi sebesar Rp15.588.523.244 atau 75,64%. Target pendapatan transfer

sebesar Rp.1.136.656.590.000 terealisasi sebesar Rp.1.175.910.533,923 atau 103,45% yang terdiri dari transfer pemerintah pusat dan provinsi, pada lain-lain pendapatan yang sah target sebesar Rp71.249.036.000 terealisasi sebesar Rp65.277.458.701 atau 91,62%, terdiri dari pendapatan hibah sebesar Rp6.571.270.000 yang terealisasi Rp1.076.193.701 atau 16,38%.

Pada tahun 2014 masih dalam kategori sangat efektif, dengan target pendapatan daerah sebesar Rp1.585.733.326.000 yang terealisasi sebesar Rp1.610.237.157.941 atau 101,55% dimana Target PAD sebesar Rp206.560.187.000 terealisasi sebesar Rp234.073.380.352 atau 113,32%. Secara keseluruhan PAD tercapai melebihi target yang ditentukan, namun khusus pada obyek PAD tentang retribusi daerah dari target sebesar Rp22.092.880.000 hanya terealisasi sebesar Rp21.083.379.548 atau 95,43%. Pada pendapatan transfer target sebesar Rp1.277.496.657.000 dengan terealisasi sebesar Rp1.277.010.279.673 atau 99,96% yang terdiri dari transfer pemerintah pusat, dana perimbangan sebesar Rp1.026.921.246.000 terealisasi sebesar Rp1.012.351.534.176 atau 98,56%, pada dana alokasi khusus yang ditargetkan sebesar Rp55.188.900.000 hanya terealisasi sebesar Rp 41.391.675.000 atau 75,00%, hal ini disebabkan pada saat pengajuan termin ke III tidak terealisasi karena termin ke II yang sudah di kirim ke kas daerah penyerapannya kurang dari 90%. Pada transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp171.705.007.000 terealisasi sebesar Rp169.337.757.000 dan transfer pemerintah Provinsi Rp78.870.404.000 terealisasi Rp95.320.988.497 atau 120,86%. Pada lain-lain pendapatan daerah yang sah target sebesar Rp101.676.482.000 dan terealisasi sebesar Rp99,153.497.916 atau 97,52% yang

terdiri dari pendapatan hibah sebesar Rp6.426.400.000 terealisasi sebesar Rp.6.248.092.916 atau 97,23% dan pendapatan lainnya sebesar Rp95,250.082.000 yang terealisasi sebesar Rp92.905.405.000 atau 97,54%.

Pada tahun 2015 rasio efektifitas berada pada kategori efektif. Dapat dilihat pada lampiran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2015 menunjukkan target pendapatan daerah sebesar Rp1.782.332.513.000 yang terealisasi sebesar Rp1.755.769.420.300 atau 98,51% dimana target PAD sebesar Rp255.275.392.000 terealisasi sebesar Rp255.284.092.547 atau 100%. Secara keseluruhan PAD tercapai sesuai target yang ditentukan, namun pada obyek PAD tentang retribusi daerah dari target sebesar Rp19.137.814.000 hanya terealisasi sebesar Rp18.093.279.315 atau 94,54% dan obyek PAD lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditentukan target sebesar Rp156.574.990.000 terealisasi sebesar Rp150.278.234.381 atau 95,98%. Realisasi Lain-lain PAD yang sah ini tidak termasuk pendapatan BLUD atas klaim pelayanan kesehatan gratis rumah sakit kelas III kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yang dianggarkan dalam Lain-lain PAD. Pada target pendapatan transfer sebesar Rp1.507.130.031.000 terealisasi sebesar Rp1.484.203.045.216 atau 98,48% terdiri dari transfer pemerintah pusat-dana perimbangan anggaran sebesar Rp1.057.634.172.000 yang terealisasi sebesar Rp1.033.505.128.258 atau 97,72%, terdiri dari dana bagi hasil pajak anggaran sebesar Rp194.673.186.000 terealisasi sebesar Rp186.319.493.300 atau 95,71%, dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) anggaran sebesar Rp1.494.079.000 terealisasi sebesar Rp1.028.273.958 atau 68,82%, dana alokasi umum anggaran sebesar Rp784.919.177.000 terealisasi 100%, dana alokasi

khusus anggaran Rp76.547.730.000 terealisasi sebesar Rp61.238.184.000 atau sebesar 80,00%. Pada tranfer pemerintah pusat lainnya yaitu dana penyesuaian anggaran sebesar Rp264.180.001.000 terealisasi sebesar 100%. Pada tranfer pemerintah daerah Lainnya yaitu dana bagi hasil pajak anggaran sebesar Rp123.345.920.000 terealisasi sebesar Rp112.356.677.958 atau 91,09%. Pada bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya anggaran sebesar Rp61.469.938.000 terealisasi sebesar Rp73.661.238.000 atau 119,83%. Dan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah dimana pendapatan hibah anggaran sebesar Rp19.927.090.000 terealisasi Rp16.282.282.537 atau 81,71%.

Pada tahun 2016 pengukuran kinerja pemerintah kabupaten Kudus berada pada kategori efektif, dapat dilihat pada lampiran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2016 menunjukkan target pendapatan daerah sebesar Rp2.027.013.360.000 dan yang terealisasi sebesar Rp1.880.999.970.784 atau 92,80% dimana pada target PAD yang ditetapkan sebesar Rp287.096.753.000 terealisasi sebesar Rp279.239.106.717 atau 97,26%. Secara keseluruhan PAD tidak dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan, antara lain disebabkan pada obyek PAD pada retribusi daerah dari target sebesar Rp18.161.100.000 hanya terealisasi sebesar Rp16.799.373.970 atau 92,50% dan obyek lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah yang ditargetkan sebesar Rp185.175.235.000 terealisasi sebesar Rp171.548.156.774 atau 92,64%. Pada pendapatan Transfer anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.727.065.154.000 dengan realisasi sebesar Rp1.591.438.820.067 atau 92,15% terdiri dari:

- Transfer Pemerintah Pusat-dana perimbangan target ditetapkan sebesar Rp1.383.453.888.000 terealisasi sebesar Rp1.290.967.072.066 atau 93,31%, yang terdiri dari dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak dengan target sebesar Rp216.607.948.000 terealisasi sebesar Rp239.240.113.901 atau 110,45%. Dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) dengan target sebesar Rp2.100.042.000 terealisasi sebesar Rp1.269.924.500 atau 60,47%; dana alokasi umum dengan target sebesar Rp.822.153.771.000 terealisasi 100%, dana alokasi khusus dengan target sebesar Rp342.592.127.000 terealisasi sebesar Rp228.303.262.665 atau 66,64%.

Pendapatan DAK hanya terealisasi sebesar 66,64%, antara lain dikarenakan: keterlambatan pengajuan anggaran dan pelaporan ke pusat, sehingga tidak sesuai jadwal proses transfer ke daerah dilaksanakan 4 tahap dan dilaksanakan per bidang. Di samping itu, adanya surat dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27001/B/PR/2016, tanggal 23 Agustus 2016, Perihal penggunaan sisa dana (SILPA) dan penghentian penyaluran transfer tunjangan profesi (TP) dan dana tambahan penghasilan (DTP) guru Tahun 2016, yang mengamanatkan apabila penyaluran dana TP dan atau DTP guru terjadi kekurangan, tetapi di kas daerah masih terdapat sisa dana tahun sebelumnya, maka dana tersebut dapat dipergunakan untuk penyaluran TP dan DTP Guru PNSD di tahun berjalan.

- Tranfer pemerintah pusat lainnya yaitu dana penyesuaian dengan target sebesar Rp.86.222.147.000 terealisasi sebesar Rp.87.184.574.200 atau 101,12% .

- Tranfer pemerintah daerah lainnya, yang merupakan pendapatan bagi hasil Pajak Provinsi dengan target sebesar Rp154.613.719.000 terealisasi sebesar Rp113.828.873.801 atau 73,62%.

Pada lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan target sebesar Rp12.851.453.000 terealisasi sebesar Rp10.322.044.000 atau 80,32% terdiri dari Pendapatan Hibah PDAM Tirta Dharma dengan target sebesar Rp12.000.000.000 yang terealisasi Rp9.786.000.000 atau 81,55% dan Hibah Water Resources and Irrigation Sector Manajement Program (WISMP) dengan target sebesar Rp851.453.000,00 terealisasi sebesar Rp536.044.000,00 atau 62,96%.

Pada tahun 2017 pengukuran kinerja pemerintah kabupaten Kudus berada pada kategori efektif. Target pendapatan daerah tahun 2017 menunjukkan sebesar Rp2.005.527.819.000 diikuti realisasi sebesar Rp1.983.213.078.247 atau 98,89% dengan rincian Target PAD ditetapkan sebesar Rp373.804.376.000 dan terealisasi sebesar Rp366.031.203.778 atau 97,92%. Keseluruhan PAD yang tercapai 101,18% tersebut dengan perincian: Pendapatan Pajak Daerah ditargetkan Rp92.804.376.000 terealisasi Rp103.927.599.502 atau 112,39%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi 100% dan lain-lain PAD yang sah yang dianggarkan sebesar Rp243.461.457.000 terealisasi Rp224.576.816.909 atau 92,24%, hal ini dikarenakan pada tahun 2017 sewa Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) selain PKD dimasukkan ke retribusi PKD sehingga retribusi daerah dari target sebesar Rp20.197.247.000 terealisasi sebesar Rp19.848.726.536,00 atau 98,28% .

Target Pendapatan Transfer yang ditetapkan sebesar Rp1.623.623.443.000 terealisasi sebesar Rp1.608.793.622.469 atau 99,09% terdiri dari:

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat target ditetapkan sebesar Rp1.336.533.094.000 terealisasi sebesar Rp1.310.924.033.469 atau 98,08%, yang terdiri dari : Dana Bagi Hasil Pajak dengan target sebesar Rp252.908.631.000 terealisasi sebesar Rp244.716.547.953 atau 96,76% ; Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) dengan target sebesar Rp2.190.381.000 terealisasi sebesar Rp1.328.040.132 atau 60,63%; Dana Alokasi Umum dengan target sebesar Rp807.711.173.000 terealisasi 100%, Dana Alokasi Khusus dengan target sebesar Rp273.722.909.000 terealisasi sebesar Rp257.168.272.384 atau 93,95%. dikarenakan sesuai dengan penyerapan kegiatan yang dibiayai oleh DAK.
- Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya yaitu Dana Penyesuaian dengan target sebesar Rp111.187.281.000 terealisasi 100%.
- Tranfer Pemerintah Daerah Lainnya, yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dengan target sebesar Rp123.074.008.000 terealisasi sebesar Rp134.625.008.000 atau 109,39%.
- Bantuan Keuangan yang merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya ditetapkan sebesar Rp52.829.060.000,00 terealisasi sebesar Rp52.057.300.000 atau 98,54%.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dengan target sebesar Rp.8.100.000.000 yang terealisasi Rp.8.388.252.000 atau 103,56% terdiri dari pendapatan hibah PDAM Tirta Dharma dengan target sebesar

Rp8.100.000.000,00 (100%) dan Hibah Water Resources and Irrigation Sector Manajement Program (WISMP) dengan realisasi sebesar Rp288.252.000.

Tingkat pengukuran kinerja keuangan secara efektif terus berfluktuasi dari tahun ke tahun, kadang mengalami peningkatan kadang kala mengalami penurunan, naik turunnya tingkat pengukuran kinerja keuangan ini disebabkan adanya realisasi pendapatan yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Anggaran yang cukup jauh perbedaannya dengan target yang diharapkan disebabkan oleh adanya kegiatan yang dianggarkan, tetapi tidak dilaksanakan. Tapi untuk kegiatan-kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Kudus yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan secara keseluruhan dengan efektif. Dan kegiatan yang sudah diprogramkan sudah terealisasi dan sesuai yang diharapkan sesuai dengan lampiran Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus periode 2013 sampai tahun 2017.